



2025



PERUBAHAN RENJA 2025



bakesbangpol.surbaya.go.id

<https://bakesbangpol.surabaya.go.id/>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.1.1 Maksud.....	1
1.1.2 Tujuan	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD.....	2
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	3
1.3 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN.....	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	7
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	13
BAB IV PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	10
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan maka diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja pada tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 diperlukan sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 agar tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kondisi yang terkini.

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

Maksud Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pada tahun berjalan.

1.1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Tahun 2025 adalah

sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025 dan sebagai bahan rumusan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
2. Pelaksanaan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
3. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Menjelaskan secara singkat mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.
20. Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Memuat informasi tentang evaluasi hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya menggunakan evaluasi realisasi DPA-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Hasil evaluasi realisasi DPA-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya sampai dengan Triwulan I.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Hasil pengukuran pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Tahun 2025 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Terdapat 6 (enam) Program yang terkait unsur pemerintahan umum dengan urusan kesatuan bangsa dan politik antara lain :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
5. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
6. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dibuat sebagai bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2025, dan beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukan Perubahan Rencana Kerja adalah perubahan anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan karena adanya penyesuaian dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran.

Sebagai gambaran pelaksanaan program berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat disampaikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
8		Unsur Pemerintahan Umum																					
8.01		Kesatuan Bangsa Dan Politik																					
8.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			14,375,109		12,429,718		13,951,229		2,493,144	-	-	-	-		2,493,144		2,493,144	17,34%			
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [644]	100 %		97,90 %		100 %		98,66 %		-	-	-	-	98,66 %		98,66 %		98,66%			
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,120,103				11,114,909		2,039,952	-	-	-	-		2,039,952		2,039,952	22,37%			
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [768]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100,00%			
8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1483]			9,120,103				11,114,909		2,039,952	-	-	-	-		2,039,952		2,039,952	22,37%			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4557]	25 Orang/bulan		28 Orang/bulan		28 Orang/bulan		24 Orang/bulan		-	-	-	-	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan		96,00%			
8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			191,802				128,788		8,825	-	-	-	-		8,825		8,825	4,60%			
			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik [769]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100,00%			
8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1484]			191,802				128,788		8,825	-	-	-	-		8,825		8,825	4,60%			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4558]	5 Paket		5 Paket		5 Paket		0 Paket		-	-	-	-	0 Paket		0 Paket		0,00%			
8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,063,203				2,707,532		444,367	-	-	-	-		444,367		444,367	8,78%			
			Persentase penyediaan jasa penunjang umum [770]	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-	-	100 %		100 %		100,00%			
8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [1485]			5,063,203				2,707,532		444,367	-	-	-	-		444,367		444,367	8,78%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4559]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		1 Laporan		-	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		25,00%			
8.01.02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			846,659		3,407,210		5,906,877		89,212	-	-	-	-		89,212		89,212	10,54%			
			Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan [308]	94 %		92,78 %		93 %		93,33 %		-	-	-	-	93,33 %		93,33 %		99,29%			
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			846,659				5,906,877		89,212	-	-	-	-		89,212		89,212	10,54%			
			Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan [348]	291 Lembaga		291 Lembaga		293 Lembaga		45 Lembaga		-	-	-	-	45 Lembaga		45 Lembaga		15,46%			
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [810]			846,659				5,906,877		89,212	-	-	-	-		89,212		89,212	10,54%			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan [5849]	291 Orang		291 Orang		293 Orang		45 Orang		-	-	-	-	45 Orang		45 Orang		15,46%			
8.01.03		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			8,317,287		122,734,960		17,524,830		7,100	-	-	-	-		7,100		7,100	0,09%			

					Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik [312]	100 %		54.23 %		77 %		50.38 %		-	-	-	-	50.38 %		50.38 %		50.38%			
8.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		8,317,287				17,524,830		7,100		-	-	-		7,100		7,100		0.09%			
Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)					
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%				
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																					
					Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik [358]	70 Lembaga		30 Lembaga		70 Lembaga		0 Lembaga		-	-	-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%			
8.01.03.2.01.0004				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [820]		8,317,287				17,524,830		7,100		-	-	-		7,100		7,100		0,09%			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah [5851]	140 Orang		60 Orang		140 Orang		0 Orang		-	-	-		0 Orang		0 Orang		0.00%			
8.01.04				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		59,370		60,078		84,368		2,500		-	-	-		2,500		2,500		4,21%			
				Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [325]		100 %		100.00 %		81 %		0.00 %		-	-	-		0.00 %		0.00 %		0.00%			
8.01.04.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		59,370				84,368		2,500		-	-	-		2,500		2,500		4,21%			
					Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan [360]	30 Lembaga		31 Lembaga		31 Lembaga		0 Lembaga		-	-	-		0 Lembaga		0 Lembaga		0.00%			
8.01.04.2.01.0005				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah [850]		59,370				84,368		2,500		-	-	-		2,500		2,500		4,21%			
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah [5852]	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		0 Laporan		-	-	-		0 Laporan		0 Laporan		0.00%			
8.01.05				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		823,293		686,028		806,743		77,082		-	-	-		77,082		77,082		9,36%			
				Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina [327]		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%			
8.01.05.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		823,293				806,743		77,082		-	-	-		77,082		77,082		9,36%			

						Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budayaerumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pertahanan ekonomi, sosial dan budaya [368]	8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		8 Lembaga		-	-	-	-	8 Lembaga		8 Lembaga		100.00%	
8.01.05.2.01.0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [853]		823,293			806.743		77.082		-	-	-	-	77.082		77.082			9.36%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah [5850]	690 Orang		702 Orang		690 Orang		140 Orang		-	-	-	-	140 Orang		140 Orang		20.29%	
8.01.06						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		12,624,896		11,907,791		12,803,112		2,972,819		-	-	-	2,972,819		2,972,819		23,55%	
						Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%		
Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%						
						ditindaklanjuti [1396]																		
						Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti [428]	100 %		100.00 %		100 %	100.00 %			-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%		
8.01.06.2.01						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12,624,896			12,803,112	2,972,819		-	-	-	-	2,972,819		2,972,819		23,55%		
						Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial [2141]	18 Lembaga		17 Lembaga		17 Lembaga	17 Lembaga		-	-	-	-	17 Lembaga		17 Lembaga		94.44%		
						Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional [474]	12 Lembaga		14 Lembaga		14 Lembaga	13 Lembaga		-	-	-	-	13 Lembaga		13 Lembaga		108.33%		
8.01.06.2.01.0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [1277]		11,875,472			12,083,834	2,923,241		-	-	-	-	2,923,241		2,923,241		24,62%		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [4556]	18 Orang		24 Orang		17 Orang	17 Orang		-	-	-	-	17 Orang		17 Orang		94.44%		
8.01.06.2.01.0005						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [1010]		749,424			719,278	49,579		-	-	-	-	49,579		49,579		6,62%		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah [4555]	44 Laporan		45 Laporan		44 Laporan	4 Laporan		-	-	-	-	4 Laporan		4 Laporan		9.09%		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya yang diletakkan di Tahun 2025 adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
 - ✓ Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - ✓ Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah dibuat pada tahun anggaran yang berjalan, perubahan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Agar tujuan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai, diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah dibuat.

Perubahan rencana program dan kegiatan antara lain memuat :

- a. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
- b. Kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

Adapun perubahan rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	13,951,229,284	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	14,380,023,454
	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,114,908,801	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,423,459,221
	8.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	11,114,908,801	8.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/ bulan	11,423,459,221
	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	128,788,010	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	112,625,830
	8.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	128,788,010	8.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	112,625,830

		8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,707,532,473		8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	2,843,938,403
		8.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,707,532,473		8.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2,843,938,403
2		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	5,906,876,775		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	93%	5,906,876,775
		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	293 Lembag a	5,906,876,775		8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Lembaga RW di Kota Surabaya yang Mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	293 Lembag a	5,906,876,775
		8.01.02.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	293 Orang	5,906,876,775		8.01.02.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	293 Orang	5,906,876,775

		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
3	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	17,524,830,000		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	77%	17,440,330,000
	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta			Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	70 Lembag a	17,524,830,000		8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	70 Lembag a	17,440,330,000

		Pemantauan Situasi Politik		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Situasi Politik		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
		8.01.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	17,524,830,000		8.01.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang	17,440,330,000
4		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	84,368,000		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	81%	84,368,000
		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembag a	84,368,000		8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembag a	84,368,000

		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
		8.01.04.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	84,368,000		8.01.04.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	84,368,000	
5		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	806,743,495		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	806,743,495	
		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	8 Lembaga	806,743,495		8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial		Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	8 Lembaga	806,743,495	

		dan Budaya		Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				dan Budaya		Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
		8.01.05.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	806,743,495		8.01.05.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	690 Orang	806,743,495
6		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	12,803,112,207		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	12,762,030,410
				Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%					Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	

		8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	14 Lembag a	12,803,112,207		8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	12 Lembag a	12,762,030,410
				Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembag a					Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	17 Lembag a	
		8.01.06.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	17 Orang	12,083,833,997		8.01.06.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	17 Orang	12,043,659,600

		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
		8.01.06.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	719,278,210		8.01.06.2.01.000 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 Laporan	718,370,810

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan diatasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025
KEPALA BADAN,

TUNDJUNG ISWANDARU ST,MM.
Pembina Tk. I
NIP 196904071991031009